

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran daerah termasuk dasar dari anggaran keuangan yang pada pelaksanaannya dilakukan guna pelayanan publik yang disebut juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD menjadi daftar terperinci dari pendapatan daerah dan pengeluaran daerah dalam satu tahun yang terdiri atas pelbagai komponen seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU) dan lain sebagainya serta pengeluaran yang mencakup pelbagai belanja seperti Belanja Modal.

Berlandaskan UU No. 32 tahun 2004, dijabarkan bila diberikannya otonomi luas pada pemerintah daerah bertujuan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat. UU ini merupakan salah satu kebijakan yang berisi penjelasan bila daerah diberikan wewenang guna mengurusinya secara mandiri dengan sedikit campur tangan dari pemerintah pusat. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pelayanan publik yang berstandar baik. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sekarang ini sama-sama berkesempatan guna melakukan perbaikan terkait pelayanan publik yang dulunya terpinggirkan. Salah satu upaya pemerintah daerah guna mengoptimalkan kemandirian daerahnya yaitu melalui pengoptimalan pendapatan daerah dan menyediakan proporsi pengalokasian belanja yang lebih tinggi pada berbagai sektor yang dinilai produktif.

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan keadaan perekonomian dari suatu daerah yang diketahui melalui peningkatan jumlah barang ataupun jasa yang dihasilkan daerah tersebut. Pertumbuhan ini mencakup pertambahan pendapatan masyarakat. Adapun salah satu faktor yang memberi pengaruh pada pertumbuhan perekonomian ialah pendapatan daerah. Apabila pendapatan daerahnya meningkat, hal ini akan membuat pemerintah daerah tersebut meningkatkan belanjanya untuk memperbaiki juga meperlengkapi infrastuktur dan sarana prasarana guna tercapainya pertumbuhan perekonomian yang lebih baik. Adapun besaran pertumbuhan perekonomian yang ada di tiap-tiap daerah mampu membuat hubungan antara pendapatan dan dana terhadap belanja daerah tersebut makin kuat ataupun makin lemah.

Berlandaskan PP No. 71 Tahun 2010, menjelaskan belanja diakui ketika munculnya kewajiban, yang terjadinya konsumsi asset, ataupun terjadinya penurunan manfaat perekonomian ataupun potensi jasa. Klasifikasi ekonomi guna pemerintah pusat dan daerah mencakup belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, serta belanja lain-lain. Belanja yang besar menjadi refleksi atas jumlah pembangunan sarana dan infrastruktur. Sesuai logika, makin banyak sumber yang menghasilkan, maka makin banyak pula hasil yang didapat. Di Provinsi Sumatera Utara kami melihat belanja yang besar tetapi masih kurangnya pembangunan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan. Kondisi ini mengakibatkan tidak optimalnya pergerakan barang antar daerah terlebih diwilayah-wilayah terpencil yang mengalami keterbatasan jalan.

Berlandaskan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) seluruh jenis penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Sumatera Utara, bagian Dana Perimbangan mempunyai kontribusi yang paling besar pada total Penerimaan Daerah. Pada tahun 2017 bagian ini memberikan kontribusi 64.97%. Hal tersebut mengindikasi bahwa pemerintah daerah masih terlalu menggantungkan diri pada dana bantuan pemerintah pusat guna mendanai pembangunan di daerah. Dilihat dari data belanja tidak langsung, persentase belanja pegawai menjadi penyumbang paling besar, yaitu 38.41% terhadap belanja tidak langsung dan 25.08% terhadap total belanja daerah pada tahun 2017. Begitu juga ditahun berikutnya 39.46% terhadap belanja tidak langsung, dan 27.58% terhadap total belanja daerah. Pengalokasian belanja modal seharusnya diselaraskan dengan kebutuhan daerah atas sarana dan prasarana

baik guna fasilitas publik maupun guna memudahkan tugas pemerintahan. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat ada peningkatan setiap tahunnya untuk belanja pegawai. Hal ini mengakibatkan belanja guna pembangunan infrastruktur cenderung dikesampingkan. Belanja kepegawaian memanglah diperlukan agar pemerintahan bisa berjalan, namun pembangunan infrastruktur juga mesti diperhatikan lantaran infrastruktur menjadi daya tarik investasi. Investasi yang besar akan memicu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan bisa ditingkatkan sehingga tidak terus menerus tergantung pada dana dari pusat. Pendapatan yang rendah sebagian besar karena perekonomian daerah tersebut masih lemah. Kami melihat langsung dan berdasarkan data, Sumatera Utara masih belum bisa maksimal meningkatkan perekonomian dan menarik investor karena infrastruktur yang tidak memadai. Data menunjukkan dari 34.109.418 km jalan di Sumatera Utara lebih banyak jalan yang dalam keadaan sedang, rusak dan rusak berat ketimbang dalam posisi baik. Kondisi tersebut sebenarnya sangat perlu mendapat perhatian karena membuat pertumbuhan ekonomi tidak maksimal dan akan mengurangi minat investor. Sumatera Utara juga turut terdampak pandemic COVID-19. Pengurangan dana dari pusat mencapai 40% dan pendapatan juga menurun. Hal ini mengakibatkan banyak program pembangunan yang sudah direncanakan harus dibatalkan dan dengan kata lain pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara saat ini akan terhambat. Berdasarkan uraian inilah yang menarik perhatian peneliti guna mencari tahu apakah terdapat pengaruh pendapatan dan dana dari pusat pada belanja yang nantinya bakal memberi dampak terhadap pertumbuhan perekonomian daerah terkait.

Berlandaskan hal tersebut peneliti menarik judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara”.

1.2 Teori Pengaruh Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal

Penelitian Setyawan (2018) membuktikan terdapatnya pengaruh PAD pada Belanja Modal. Hasil riset tersebut menyatakan kenaikan dana pemerintah daerah yang asalnya dari sumber PAD sudah dimanfaatkan secara tepat guna mendanai pembangunan daerah maupun guna pengoptimalan sarana dan prasarana melalui peningkatan pengalokasian Belanja Modal guna menyediakan pelayanan untuk publik.

Riset Juniawan dan Suryantini (2018) membuktikan bahwa adanya pengaruh positif PAD terhadap Belanja Modal. Temuan kajian ini memperlihatkan bila PAD makin tinggi, maka Belanja Modal yang bisa dialokasikan oleh pemerintah daerah juga makin tinggi juga. Hal ini menyatakan PAD yang meningkat akan memberi manfaat guna mengoptimalkan penyediaan fasilitas publik dengan membangun sarana dan prasarana terutama n infrastruktur.

Riset Jaeni dan Anggana L (2016) membuktikan bahwasanya PAD memberi pengaruh pada Belanja Modal. Temuan kajian ini mengindikasi bila besaran PAD merupakan salah satu faktor guna menetapkan belanja modal. Hal tersebut bisa diinterpretasikan apabila PAD makin tinggi, pengeluaran pemerintah terkait Belanja Modal juga mengalami kenaikan.

Berlandaskan hasil penelitian ketiga ahli tersebut maka bisa ditarik simpulan bahwasanya PAD yang makin tinggi akan membuat belanja modal yang diperoleh pun makin tinggi. Hal ini mengndikasikan bahwasanya bahwa belanja modal akan mendapat pengaruh dari PAD.

Pengaruh DAU Terhadap Belanja Modal

Riset Suryani dan Pariani (2018) memberikan hasil bila DAU memberi pengaruh pada Belanja Modal. Temuan kajian ini menyatakan bila Belanja Modal mengalami penurunan bisa dipastikan bila belanja langsung bakal mengalami penurunan pula lantaran Belanja Modal termasuk dari kelompok belanja langsung atas Belanja Daerah. Hal ini disimpulkan

makin tingginya DAU yang didapat pemerintah daerah dari pemerintah pusat, bakal membuat Belanja Modal daerah tersebut juga makin tinggi.

Riset Prabawati dan Wany (2017) memaparkan bahwasanya DAU memberi pengaruh pada Belanja Modal. Temuan kajian tersebut menyatakan bila makin tinggi DAU yang didapat akan membuat pengalokasian Belanja Modalnya makin besar. Hal ini terjadi lantaran pemerintah daerah masih terlalu menggantungkan diri pada suntikan dana dari pemerintah pusat guna mengoptimalkan pembangunan infrastruktur daerah serta sarana dan prasarana publik.

Riset Sugiarni dan Supadmi (2014) membuktikan bahwasanya adanya pengaruh DAU terhadap Belanja Modal. Temuan kajian ini memperlihatkan bila makin tingginya DAU yang diterima oleh daerah dari pusat membuat Belanja Modal yang dikeluarkan pemerintah pusat juga makin tinggi.

Berlandaskan pandangan dari ketiga ahli tersebut, bisa ditarik simpulan bahwasanya selaras dengan tujuan dari DAU yakni pengoptimalan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang makin baik. Hal tersebut mengeindikasikan bila Belanja Modal mendapat pengaruh dari DAU, makin tinggi DAU akan membuat Belanja Modal juga makin tinggi.

PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian Adyatma dan Oktaviani (2015) membuktikan bila Pertumbuhan Ekonomi tidak menguatkan ataupun melemahkan pengaruh PAD pada Belanja Modal. Hal tersebut lantaran pertumbuhan perekonomian yang tidak merata dan terdapatnya kesenjangan tiap-tiap daerah. Hal lain disebabkan pula karena kenaikan PAD lebih banyak dipakai guna mendanai belanja kepegawaian dan biaya langsung lain dibanding guna mendanai Belanja Modal.

Riset Ismiyati (2018) pada membuktikan bila Pertumbuhan perekonomian memberi pengaruh yang signifikan namun membuat pengaruh antara PAD pada Belanja Modal makin lemah. Makin tingginya Pertumbuhan perekonomian akan membuat PAD pada belanja Modal makin menurun. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah bakal melakukan pengurangan pada pengalokasian Belanja Modal dan memakai PAD guna keperluan belanja di samping Belanja Modal, misalnya belanja kepegawaian dan belanja barang/jasa dikarenakan pertumbuhan perekonomian sudah tercapai.

Penelitian Cahyaning (2018) membuktikan bahwasanya Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi tidak dapat menguatkan ataupun melemahkan hubungan antara PAD dengan Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi tidak bisa dijadikan faktor yang menentukan berlangsungnya pengaruh PAD pada Belanja Modal. Hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah kabupaten/kota ketika berupaya mengoptimalkan pertumbuhan perekonomian masih belum optimal meskipun pengoptimalan sarana dan prasarana serta fasilitas telah terpenuhi.

Berlandaskan pendapat ketiga ahli tersebut dapat disimpulkan Pertumbuhan Ekonomi memberi pengaruh dan bermampuan guna memoderasi pengaruh PAD pada Belanja Modal. Hal tersebut lantaran infrastruktur daerah serta sarana dan prasarana publik dianggarkan dari Belanja Modal. Dan pembangunan infrastruktur bisa meningkatkan PAD. Hal tersebut memberikan adanya indikasi bahwa Pertumbuhan Ekonomi bisa dibuat menjadi faktor yang menentukan berlangsungnya pengaruh PAD pada Belanja Modal.

DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi

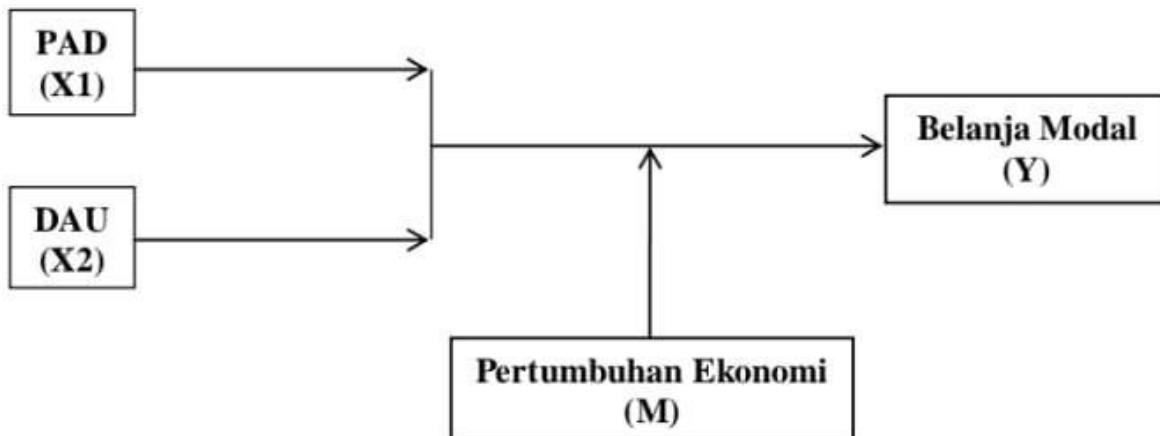
Riset Hidayati (2016) membuktikan bahwasanya Pertumbuhan Ekonomi memberi pengaruh dan mampu memoderasi DAU pada Belanja Modal. Peneliti tersebut juga menyimpulkan bila Pertumbuhan Ekonomi yang makin tinggi akan membuat pengaruh DAU pada Belanja Modal juga makin tinggi. Maka dari itu, pemerintah daerah memakai DAU guna menyediakan pelayanan pada publik supaya kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan melalui belanja modal makin meningkat.

Riset Pradana (2017) membuktikan bila Pertumbuhan Ekonomi memberi pengaruh yang signifikan dan berkemampuan guna menguatkan ataupun melemahkan hubungan DAU pada Belanja Modal. Hal tersebut mengindikasi meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi membuat pengaruh DAU pada Belanja Modal makin tinggi. Pembangunan daerah yang baik merupakan pembangunan bisa diasumsikan mampu menunjang sarana dan prasarana publik serta infrastuktur daerah.

Riset Pratama (2017) membuktikan bahwasanya Pertumbuhan Ekonomi berkemampuan guna menguatkan ataupun melemahkan pengaruh DAU dengan pengalokasian Belanja Modal. Makin baik Pertumbuhan Ekonomi sebuah daerah akan membuat DAU dan Belanja Modal juga makin besar.

Berdasarkan pendapat ketiga ahli tersebut dapat disimpulkan Pertumbuhan Ekonomi memberi pengaruh dan berkemampuan guna menguatkan ataupun melemahkan pengaruh DAU pada Belanja Modal. Hal tersebut memberikan adanya indikasi bila tingkat Pertumbuhan Ekonomi mampu membuat pengaruh DAU pada Belanja Modal makin kuat.

1.3 Kerangka konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

1.4 Hipotesis

1. PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal
2. DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal
3. PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi
4. DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi